

Perkembangan dinamika sosial-politik internasional pada era globalisasi dihadapkan pada berbagai persoalan. Salah satu persoalan yang terjadi di beberapa negara adalah migrasi ilegal pencari suaka. Berkembangnya masalah ini sebenarnya tidak lepas dari kemajuan teknologi informasi yang berkembang luas sehingga ini menjadi pengaruh yang kuat bagi masyarakat negara-negara berkembang untuk mencari peruntungan ke negara lain. Mayoritas pelaku migrasi internasional beranggapan bahwa tindakannya dapat mencapai kehidupan yang lebih baik karena berbagai alasan, diantaranya keamanan dalam negeri yang tidak kondusif, kesempatan perekonomian yang kurang, adanya tekanan sosial dan lain-lainnya. Inilah yang menyebabkan tren migrasi ilegal internasional umumnya terjadi di kelompok negara-negara berkembang, bukan negara maju. Salah satu negara yang menghadapi masalah imigran ilegal adalah Bangladesh. Negara ini sejak tahun 2010 hingga 2012 menjadi tujuan kelompok imigran ilegal baik untuk menetap pada jangka waktu yang lama, ataupun menjadikan wilayah Bangladesh sebagai transit. Keberadaan imigran ilegal di Bangladesh kemudian menyebabkan berbagai persoalan politik, diantaranya kondisi rawannya benturan sosial, masalah keamanan dan lain-lainnya. Sebagai contoh mengenai hal ini adalah ketegangan yang bernuansa SARA (Suku Agama Ras dan Antar Golongan) antara umat mayoritas Islam dengan minoritas Budha di Bangladesh, terciptanya kesenjangan ekonomi, memburuknya hubungan Bangladesh dengan Myanmar sebagai negara tetangga dan lainnya. Dalam menangani hal ini, pemerintah Bangladesh di bawah kepemimpinan presiden Zillur Rahman menjalankan berbagai kebijakan, diantaranya penegakan hukum, pendekatan persuasif hingga kerjasama regional. Gambaran mengenai kebijakan-kebijakan tersebut akan diuraikan secara mendalam pada penelitian ini.